

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Berorientasi pada permasalahan dan keberhasilan pembangunan nasional di segala sektor kehidupan, terlihat adanya ketergantungan terhadap kemampuan manusia sebagai suatu bangsa dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai sumber daya. Sebagai suatu negara yang sedang membangun dalam setiap aspek kehidupan seperti Indonesia, sangat diperlukan sumber daya manusia yang potensial, terampil, mempunyai semangat juang yang tinggi serta mempunyai kemampuan untuk memahami persoalan-persoalan pembangunan dalam bidangnya masing-masing. Kemajuan teknologi yang semakin cepat mempunyai dampak perubahan sangat besar dan berguna bagi kemajuan suatu bangsa. Keberhasilan ini tidak terlepas dari rekayasa manusia itu sendiri sebagai pengelola pembangunan dan yang menikmati hasil-hasilnya. Sumber daya manusia yang dimaksudkan hendaknya memahami arti pentingnya pembangunan bagi kesejahteraan suatu bangsa, sehingga mampu beradaptasi

mengikuti dan memilih metode atau teknologi yang tepat dalam mengisi pembangunan untuk mensejahterakan bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai kultural suatu bangsa.

Karakteristik penting dari kemampuan suatu bangsa adalah kualitas sumber daya manusia yang tinggi (high quality on human resources) sebagai pelaksana (manager) pembangunan. Kaitannya dengan ini Presiden Soeharto mengingatkan bahwa, *"yang menjadi andalan utama keberhasilan pembangunan nasional bukan kekayaan alam yang berlimpah ruah, melainkan kualitas manusia Indonesia, dan meningkatkan kualitas manusia merupakan tugas pendidikan"*. (Engkoswara, 1984; 3). Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk yang relatif sangat besar diharapkan mampu menjadi modal bagi pembangunan bangsanya, dalam hal ini nampak betapa pentingnya manusia-manusia yang berkualitas tinggi sebagai pelopor/pengelola pembangunan. Keterlibatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat menentukan, terutama dalam mengejar ketinggalan bangsa Indonesia pada penguasaan iptek dari bangsa-bangsa lain. Moh.Fakry Gaffar mengungkapkannya sebagai berikut :

*"keberhasilan pembangunan itu sangat ditentukan oleh faktor manusia, dan manusia yang menentukan keberhasilan pembangunan itu haruslah manusia yang mempunyai kemampuan membangun. Kemampuan membangun ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan"*.(1987; 2)

Dalam bidang pendidikan manusia yang mempunyai kemampuan membangun yang dimaksudkan adalah para pelaksana pendidikan. Seperti dikemukakan Wardiman Djojonegoro bahwa *"pendidik adalah mata rantai terpenting untuk efisien tidaknya transfer ilmu pengetahuan"* (Kompas 2 Mei; 1994). Selanjutnya beliau menyatakan tentang peran pendidikan dalam pembangunan, adalah : *"Pendidikan akan semakin dituntut untuk tampil sebagai kunci keberhasilan dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu manusia yang memiliki kemampuan, kepribadian dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan"*. (19 Oktober; 1994) Pendidikan dapat dijadikan instrumen atau alat yang tepat dan ampuh dalam membentuk manusia supaya mempunyai kemampuan membangun, yaitu mereka yang memiliki prakarsa, dinamis dan percaya atas kemampuan dirinya dalam menyongsong tantangan pembangunan masa depan.

Penyelenggaraan wajar sampai dengan tingkat SLTP sebagai upaya pemerataan pendidikan minimal masyarakat telah dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah. Konsep pemerataan ini berkaitan dengan makna persamaan (equality) dan keadilan (equity). Zainal Arifin Achmady mengemukakan: *"Persamaan berarti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan"* (1994;

11). Sedangkan keadilan berarti "memberikan perlakuan yang adil dan wajar kepada orang (peserta didik) berdasarkan kondisi dan latar belakang hidupnya" (1994; 11). Dalam penyelenggaraan wajar usaha-usaha pendidikan ke arah persamaan harus terus dilakukan walaupun dalam kenyataan perbedaan itu akan tetap ada karena faktor-faktor yang tidak dapat dihindarkan (seperti lokasi tinggal, kemampuan intelektual). Secara adil seharusnya tidak ada lagi perbedaan kesempatan karena faktor lingkungan dan sosial ekonomi, tetapi secara proporsional menurut kondisi mereka harus dapat memberikan layanan pendidikan terhadap semua anak usia wajib belajar.

Pembangunan pendidikan dewasa ini masih belum dapat memenuhi harapan, pemerintah mengakui masih terdapat kesenjangan antara tuntutan dunia kerja (tenaga kerja yang berkualitas) dengan kemampuan lembaga-lembaga pendidikan untuk memenuhinya. Dalam mengatasi kesenjangan ini pemerintah berusaha memperbaikinya dengan mengembangkan pembangunan pelayanan pendidikan, diantaranya melalui : "Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah"(UU.RI.No.2; 1989; pasal 10). Penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah dalam lingkup

pengelolaan sistem pendidikan nasional, pelaksanaannya dapat dilakukan pada sekolah-sekolah negeri dan swasta. *"Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional"* (UU.RI.No.2; 1989; pasal 47). Dalam pelaksanaannya sekolah-sekolah negeri dikelola berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah secara nasional, sementara pada pengelolaan sekolah-sekolah swasta disamping harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, juga harus tunduk pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan yayasan penyelenggara pendidikan yang memiliki karakteristik berbeda antara satu dengan lainnya. *"Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan"* (UU.RI. No.2; 1989; pasal 47). Adanya perbedaan birokrasi dalam pengelolaan sekolah-sekolah negeri dan swasta, menuntut pemahaman para penyelenggara pendidikan swasta tentang perbedaan peraturan tersebut. Begitu pula halnya dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP, perlu pemahaman (persepsi) dan sikap tertentu dari pengelola pendidikan untuk terselenggaranya aktivitas pengelolaan pendidikan.

Perbedaan karakteristik yayasan yang mewarnai

pengelolaan pendidikan sekolah-sekolah swasta, menuntut penanganan yang berbeda antara sekolah yang satu dengan lainnya. Pemerintah telah memutuskan untuk segera merealisasikan wajar tingkat SLTP dengan berbagai bantuan sarana dan fasilitasnya kepada sekolah-sekolah negeri, sementara masyarakat (sekolah-sekolah swasta) harus berusaha dengan caranya sendiri supaya bisa berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang tidak lepas dari unsur bisnis. *"Walaupun masyarakat tidak setuju untuk menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis, namun sulit dihindari penyelenggaraan pendidikan dari praktek bisnis"* (Suwarma Al-Mukhtar; 1992; 77). Pada kondisi seperti ini akan terjadi jurang pemisah dalam bentuk perbedaan biaya pendidikan yang semakin mencolok antara sekolah-sekolah negeri dengan sekolah-sekolah swasta. Konsekwensinya biaya pendidikan pada sekolah-sekolah swasta akan lebih mahal, sementara keterlibatan atau peran serta mereka dalam mendukung program pendidikan pemerintah (wajar) masih harus tetap dipertahankan eksistensinya. Pada keadaan yang demikian upaya mempertahankan kontinuitas sekolah-sekolah swasta diduga akan semakin sulit bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Untuk mempertahankan eksistensinya, sekolah sekolah swasta akan mencari jalan keluarnya masing masing. Kondisi ini dapat dipahami karena sampai saat ini

sumber dana yang utama untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan pada sekolah-sekolah swasta adalah dari peserta didik.

Pendapat lain yang dapat mempengaruhi eksistensi sekolah-sekolah swasta pada tingkat SLTP dalam rangka pelaksanaan program wajar menyatakan :

"ternyata prosentase yang melanjutkan ke tingkat SLTP di berbagai daerah terutama di Jawa Barat masih rendah dan sangat mengejutkan dengan prosentase kurang dari 50%. Ada asumsi yang kuat faktor penyebabnya bukan kepedulian atau keinginan masyarakat yang rendah untuk menyekolahkan anaknya, namun diduga faktor ekonomi orang tua tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah anaknya". (Suwarma Al-Mukhtar; 1992; 80).

Walaupun pada sisi lain, faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan pendidikan ini belum tergali secara optimal, misalnya keterlibatan pihak yang lebih mampu (para pengusaha) melalui gerakan orang tua asuh. Namun belum diketemukan upaya strategis apa yang harus dilakukan untuk melibatkan mereka supaya mau terlibat mendukung pendanaan pendidikan, sehingga faktor ekonomi yang menjadi kendala untuk masyarakat tertentu tidak lagi menjadi hambatan pendidikan (dapat menyelesaikan pendidikan dasar), dan sekaligus akan sangat menunjang kontinuitas lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan swasta.

Khusus untuk di Jawa Barat, dalam menyongsong pelaksanaan program wajar ini telah dilakukan tindakan preventif yang diatur dalam "Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas)" dalam SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 04 tahun 1993, seperti yang tercantun dalam "Strategi dan Tujuan Program Pokok Wajar", diantaranya sebagai berikut :

"Strategi; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar diarahkan pada upaya memobilisasi aparat pemerintah dan masyarakat dalam rangka mempertahankan keberhasilan wajib belajar sekolah dasar dan merintis tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melalui jalur Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah. Tujuan Program Pokok; (1) Mewujudkan keterpaduan dan kesatuan arah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. (2) Mendukung keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar. (3) Memasyarakatkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar agar menjadi gerakan masal. (4) Untuk mengetahui kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana Pendidikan Dasar. (5) Menyiapkan kondisi aparat dan masyarakat serta sarana/prasarana pendukung pelaksanaan Wajib Belajar tingkat SLTP.

Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas dan UU.RI.No.2 tahun 1989, tentang ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pada permulaan pelaksanaan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP. Maka dalam penelitian ini akan mencoba mengungkapkan permasalahan tentang : "Persepsi, Sikap dan Partisipasi para pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP". Hal ini sangat erat

kaitannya dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai peningkatan pelayanan pendidikan, yang menjadi prioritas pertama pembangunan pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya seperti dikemukakan Engkoswara bahwa : *"Keberhasilan meningkatkan kualitas produktivitas pendidikan nasional akan sangat dipengaruhi oleh manusia para pengelola pendidikan itu"*. (Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II). Kiranya jelas bahwa keberhasilan program wajar inipun akan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan para pengelola pendidikan di dalamnya. Keterlibatan para pengelola dalam aktivitas suatu organisasi pendidikan akan dipengaruhi oleh keyakinan atau persepsi dan sikap mereka dalam menilai aktivitas organisasi itu.

## **2. Masalah dan Pembatasan Masalah**

Pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dan menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara manusia sebagai pengelola pendidikan merupakan kekuatan pertama dan utama dalam pembangunan pendidikan suatu bangsa. Pencanangan wajib belajar pendidikan dasar sampai dengan tingkat SLTP merupakan

pencerminan dari kesungguhan usaha pemerintah dalam mewujudkan tugas-tugas/pelayanan pendidikan melalui kebijaksanaan wajar pendidikan dasar 9 tahun. "Pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan enam tahun di Sekolah Dasar dan program pendidikan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama". (PP. No. 28; 1990; Pasal 2). Kebijakan pemerintah ini merupakan upaya nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk bentuk penyempurnaan pelayanan pendidikan, melalui kesempatan pemerataan pendidikan masyarakat.

Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah menjadi keputusan pemerintah untuk segera direalisasikan, yang dalam pelaksanaannya adalah merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Konsep tanggung jawab bersama ini mempunyai pengertian, bahwa sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi lingkungannya.

Harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di sekolah hanya dapat diupayakan melalui kerjasama yang harmonis antara pihak-pihak yang terlibat

dalam pengelolaan pendidikan. Onong U Efendi mengemukakan, "Public Relations adalah kegiatan berencana untuk menciptakan, membina dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi organisasi disatu pihak dan bagi masyarakat di lain pihak" (1973; 35). Sehingga secara administratif dalam berorganisasi "perlu mamakai pendekatan tingkah laku karena sifatnya yang interdisipliner" (Program Akta Mengajar V; 1982/1983; 22)

Administrasi pendidikan adalah suatu ilmu tentang kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerjasama ini keseimbangan dan keselarasan harus tetap terjaga pada setiap pelaksanaan tugas-tugas kependidikan, sehingga akan terpelihara suasana kerja yang menyenangkan bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Dari suasana yang demikian itu diharapkan mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi (tujuan pendidikan).

Begitu pula dalam pelaksanaan wajar pendidikan dasar pada tingkat SLTP, kerjasama ini harus tercipta dalam suatu kondisi yang memungkinkan peserta didik mau dan mampu melakukan kegiatan belajar karena ditunjang oleh

suasana yang memungkinkan peserta didik betah belajar. Seperti yang dikemukakan Bambang Wisudo "Pendidikan bertujuan mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan masyarakat, budaya dan lingkungannya" (Kompas; 2 Mei; 1994). Suasana yang demikian itu harus diupayakan dan dikondisikan oleh para pengelola pendidikan dalam memberikan pelayanannya pada pelaksanaan program pemerintah yang baru itu.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kependidikan yang baru ini, peran pengelola pendidikan sangat menentukan. "Keikutsertaan guru ini bukan berarti hanya dalam arti fisik atau kuantitas. Namun yang lebih penting ialah keikutsertaan secara mental yang didukung oleh kemampuan profesional" (Suyanto; Kompas 2 Mei; 1994). Keterlibatan peran mereka dalam mengelola pendidikan tidak hanya bersifat fisik belaka tetapi juga kesiapan mental yang ditunjang oleh kemampuan profesional dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui bagaimana kesiapan atau kondisi awal dan kemampuan mereka supaya dapat terlibat atau memberikan kontribusinya secara optimal pada pelaksanaan tugas-tugas kependidikan yang berat ini dalam rangka menyongsong

pelaksanaan program pemerintah yang baru itu. Dengan kata lain dapat dikatakan; bagaimana persepsi, sikap dan partisipasi mereka terhadap pelaksanaan program wajar pendidikan dasar tingkat SLTP. Wajar tingkat SLTP adalah merupakan program baru pemerintah dalam mengupayakan penyempurnaan pelayanan/pemerataan pendidikan.

Dalam tulisan ini upaya untuk mengetahui bagaimana persepsi, sikap dan partisipasi para pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP, dibatasi hanya pada jalur pendidikan formal (sekolah), yaitu pada jenis pendidikan umum (SLTP umum atau SMP) dan jenis pendidikan keagamaan (Tsanawiyah), yang diselenggarakan oleh lembaga/badan pendidikan swasta (masyarakat) di Kotamadya Bandung dalam rangka pelaksanaan wajar pendidikan dasar 9 tahun.

Secara empirik banyak faktor/variabel yang mempengaruhi keterlibatan para pengelola pendidikan, baik yang menyangkut unsur fisik maupun psikologis. Maka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik dalam penelitian ini ditetapkan; variabel persepsi dan variabel sikap pengelola pendidikan sebagai variabel independen yang secara psikologis diduga sebagai variabel penentu yang

dapat mempengaruhi keterlibatan atau partisipasi (variabel dependen) mereka dalam organisasi pendidikan. Kemudian ditetapkan pula pengalaman kerja sebagai variabel moderator, gairah kerja sebagai variabel intervening, sarana dan prasarana pendidikan sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa karakteristik penting yang ingin dipelajari dan dikaji lebih mendalam disajikan dalam rumusan sebagai berikut : *"Persepsi, Sikap dan Partisipasi para pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP"*. Masalah pokok yang ingin dijawab dijabarkan dalam rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi, sikap dan partisipasi para pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP ?
2. Apakah terdapat hubungan yang berarti antara persepsi terhadap sikap pengelola pendidikan dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP ?
3. Apakah terdapat hubungan yang berarti antara persepsi terhadap partisipasi pengelola pendidikan dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP ?
4. Apakah terdapat hubungan yang berarti antara sikap

terhadap partisipasi pengelola pendidikan dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP ?

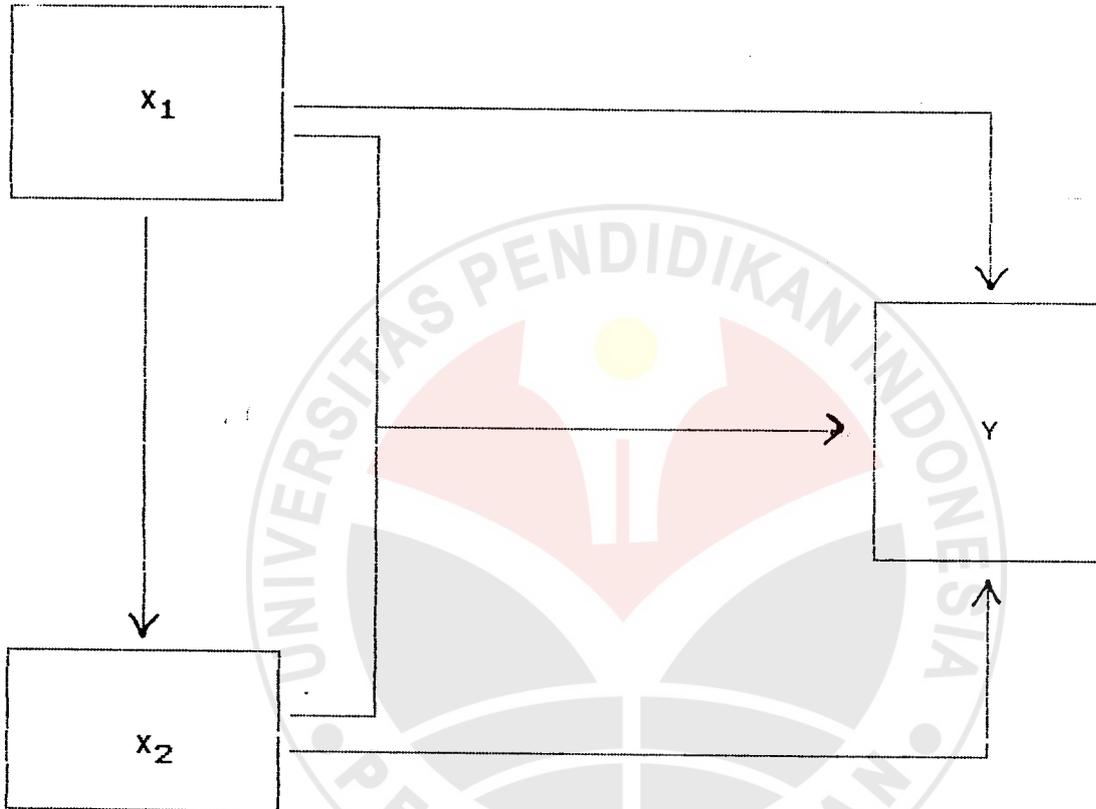
5. Secara bersama-sama apakah terdapat hubungan yang berarti antara persepsi dan sikap terhadap partisipasi pengelola pendidikan dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP ?

6. Apakah persepsi, sikap dan partisipasi pengelola pendidikan dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP berbeda secara berarti, dilihat dari latar belakang pendidikan dan status akreditasi sekolah ?

Secara konseptual dapat disajikan gambaran fungsional keterkaitan antara persepsi, sikap dan partisipasi pengelola pendidikan : Seseorang mempunyai persepsi, sikap dan partisipasi tertentu (berbeda) dengan yang lainnya terhadap suatu obyek. Kaitannya dengan penyelenggaraan wajar ini, latar belakang pendidikan pengelola dan status akreditasi sekolah, adalah merupakan variabel yang dapat diidentifikasi untuk melihat perbedaan tersebut. Dengan kata lain bahwa persepsi, sikap dan partisipasi pengelola pendidikan terhadap penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP, diduga dapat dibedakan dari latar belakang pendidikan dan status akreditasi sekolah yang dibinanya.

Keterkaitan antara variabel yang diteliti dapat digambarkan dalam bentuk paradigma berpikir berikut :

**Bagan 1**  
**Keterkaitan antar Variabel Penelitian**



Keterangan :  $X_1$  = Persepsi (V.Independen)  
 $X_2$  = Sikap (V.Independen)  
 $Y$  = Partisipasi (V.Dependen)  
———— = Garis yang menunjukkan hubungan

### 3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara rinci dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran empirik tentang persepsi, sikap dan partisipasi para pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP di Kotamadya Bandung.
2. Untuk memperoleh gambaran empirik tentang hubungan fungsional antara persepsi terhadap sikap pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP.
3. Untuk memperoleh gambaran empirik tentang hubungan fungsional antara persepsi terhadap partisipasi pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP.
4. Untuk memperoleh gambaran empirik tentang hubungan fungsional antara sikap terhadap partisipasi pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP.
5. Untuk memperoleh gambaran empirik tentang hubungan fungsional antara persepsi dan sikap terhadap partisipasi pengelola pendidikan swasta dalam

penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP.

6. Untuk memperoleh gambaran empirik tentang perbedaan persepsi, sikap dan partisipasi para pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP di Kotamadya Bandung, dilihat dari latar belakang pendidikannya dan status akreditasi sekolah yang dikelolanya.

#### 4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi para peneliti lain yang tertarik pada upaya-upaya mempersiapkan diri (pengelola pendidikan) dalam menyongsong tuntutan/dinamisasi kerja, sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan masyarakat.
2. Secara praktis, dapat digunakan/dijadikan pedoman oleh para praktisi pendidikan dalam menghadapi tuntutan perubahan kebijakan kerja dan perkembangan masyarakat. Upaya-upaya praktis untuk meningkatkan prestasi kerja (kualitas pengelolaan pendidikan) akan semakin jelas

dan terarah apabila ditunjang oleh kesiapan mental dalam perannya sebagai pengelola pendidikan (sebagai fasilitator dan administrator pendidikan) yang bertanggung jawab.

3. Kaitannya dengan program wajar pendidikan dasar :
  - a. Sebagai masukan/informasi bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang upaya-upaya persiapan diri para praktisi pendidikan untuk meningkatkan prestasi kerja (pelayanan pendidikan), serta menyongsong perubahan sistem pendidikan nasional (wajar tingkat SLTP) yang telah dicanangkan pemerintah untuk segera dilaksanakan.
  - b. Memberikan masukan/informasi bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, tentang keterkaitan unsur-unsur psikologis (persepsi, sikap dan partisipasi), yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas para pengelola pendidikan dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan.
  - c. Sebagai bahan kajian pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan pelayanan/pemerataan pendidikan melalui wajar pendidikan dasar tingkat SLTP, pada perencanaan dan pelaksanaannya secara lebih seksama untuk mendapatkan hasil yang optimal.

## 5. Asumsi dan Hipotesis

### a. Asumsi

Asumsi atau anggapan dasar adalah suatu sistem kebenaran yang akan dijadikan titik tolak dalam melakukan suatu penelitian dan pemecahan masalah. Beberapa asumsi yang dapat dirumuskan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan pendidikan yang menuntut tertib administrasi, harus sejalan dengan kesiapan (persepsi, sikap dan partisipasi) para pelakunya.
2. Persepsi dan sikap para pengelola pendidikan terhadap wajar dapat mempengaruhi aktivitas/ partisipasi mereka dalam pelaksanaannya.
3. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan (wajar) sangat dipengaruhi oleh peran atau partisipasi para pengelolanya.
4. Sebagai unsur kajian, pengelola pendidikan dapat dikelompokkan menjadi; tenaga pimpinan, tenaga edukatif, dan tenaga administratif.

## b. Hipotesis Penelitian

Mengacu pada konsep berpikir dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat gambaran tertentu tentang persepsi, sikap dan partisipasi para pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP.
2. Terdapat hubungan tertentu antara persepsi terhadap sikap. Kecenderungannya semakin kuat persepsi seseorang (pengelola pendidikan) terhadap pelaksanaan program wajar maka akan semakin positif sikapnya.
3. Terdapat hubungan tertentu antara persepsi terhadap partisipasi. Kecenderungannya semakin kuat persepsi seseorang (pengelola pendidikan) terhadap pelaksanaan program wajar maka akan semakin aktif tingkat partisipasinya.
4. Terdapat hubungan tertentu antara sikap terhadap partisipasi. Kecenderungannya semakin positif sikap seseorang (pengelola pendidikan) terhadap pelaksanaan program wajar maka akan semakin aktif tingkat partisipasi.

5. Terdapat hubungan tertentu antara persepsi dan sikap terhadap partisipasi. Kecenderungannya semakin kuat persepsi dan semakin positif sikap seseorang (pengelola pendidikan) terhadap pelaksanaan program wajar akan semakin aktif tingkat partisipasi mereka.
6. Persepsi, sikap dan partisipasi pengelola pendidikan swasta dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP berbeda secara signifikan, dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, dan status akreditasi sekolah yang dikelolanya.

